

EDISI : Kamis, 11 November 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA**EDISI :Kamis, 14 November 2019**

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Aparatur Kecamatan Dipacu Tingkatkan Kualitas Evaluasi APBDesa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten buleleng terus berupaya memacu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kali ini, dinas PMD Buleleng melaksanakan kegiatan in house training peningkatan kepastian bagi personil kecamatan dan sejumlah staf pada dinas PMD yang selama ini bertugas melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa.	
		Sarasehan kepahlawanan, Pacu semangat Generasi bangsa	Guna memacu semangat generasi bangsa dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Negara kesatuan republic Indonesia pemerintah kabupaten buleleng melalui dinas sosial. Kabupaten buleleng menggelar sarasehan tentang kepahlawanan serangkaian dengan peringatan hari pahlawan ke-74 hut ke-73 puputan margarana dan napak tilas perjuangan pahlawan nasional I gusti ngurah rai bertempat di monument perjuangan tri yudha sakti, selasa (12/11)malam lalu.	
2	NUSA BALI	Anggaran Disdikpora Dipangkas Rp 40 Miliar	Fokus pembangunan revitaliasasi pasar banyuasri, membuat sejumlah anggaran di masing-masing organisaasi perangkat daerah kabupaten buleleng diciutkan. Salah satunya dinas pendidikan pemuda dan olahraga buleleng paguanggaran di tahun 2020 dipotong rp 40 miliar. Pemotongan anggaran tersebut membuat sejumlah program disdikpora belum memiliki anggaran tdan terancam tidak bisa terlaksanakan.	

		Lahan Hotel Melka Dijadikan kantor Cabang PDAM	Lahan seluas 700 meter persegi yang selama ini dikuasai oleh hotel Melka, di Desa Kalibukbuk, kecamatan buleleng, berhasil diambilkan oleh Pemkab buleleng. kini lahan tersebut diserahkan pada PDAM Buleleng untuk lokasi pembangunan kantor cabang.	
--	--	--	---	--



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *NUSA BALI*

Kategori : *Pendidikan*

Anggaran Disdikpora Dipangkas Rp 40 Miliar

★ Pelaksanaan UN Terancam Terganggu

SINGARAJA, NusaBali

Fokus pembangunan revitalisasi Pasar Banyuasri, membuat sejumlah anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng dicitrakan. Salah satunya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng yang pagu anggaran di tahun 2020 dipotong Rp 40 miliar. Pemotongan anggaran tersebut membuat sejumlah program Disdikpora belum memiliki anggaran dan terancam tak bisa terlaksana. Di antaranya Ujian Nasional (UN) yang menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya yang wajib dilaksanakan.

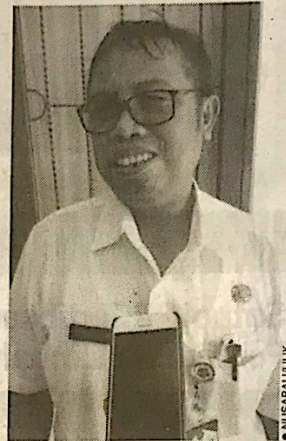
Kepala Disdikpora Buleleng Gde Dharmaja, ditemui usai rapat badan anggaran di DPRD Buleleng, Rabu (13/11) kemarin menjelaskan, karena keterbatasan alokasi anggaran Disdikpora mendapat pengurangan anggaran Rp 40 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2020 mendatang Disdikpora hanya menerima total anggaran untuk seluruh kegiatan Rp 154 miliar, sedangkan di tahun 2019 mencapai Rp 200 miliar lebih.

Nah yang menjadi ganjalan sejauh ini ada pada anggaran belanja tidak terarah yang tahun ini menghabiskan anggaran Rp 31 miliar. Di antaranya belanja pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah,

US, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), evaluasi dan monitoring, operasional, peringatan hari besar nasional, Paskibraka, Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) hingga program Calon Kepala Sekolah (Cakep), calon pengawas (Cawas) yang juga sudah diprogramkan. Namun di tahun tahun anggaran 2020 sisa anggaran untuk belanja tak terarah hanya menyisakan Rp 1,7 miliar dari total anggaran Rp 154 miliar, sehingga masih kekurangan banyak anggaran.

"Alokasi anggaran pemerintah yang sangat terbatas, kami Disdikpora bisa memahami. Hanya saja sejumlah program di belanja tidak terarah kami tahun depan belum ada anggarannya dan beberapa memang masih termasuk program prioritas yang harus dilaksanakan," jelas Dharmaja.

Disdikpora Buleleng pun berharap sebelum tiba tahun anggaran 2020, masalah yang tengah dihadapi Disdikpora mendapatkan solusi konstruktif dan jalan keluar. "Menurut hitung-hitungan kami untuk di belanja tak terarah kegiatan diminimalkan dengan mengencangkan ikat pinggang masih perlu Rp 18,6 miliar, mudah-mudahan ini bisa dicarikan solusi," imbu dia. Sementara itu pengurangan anggaran yang terjadi di tahun 2020 mendatang harus mengorbankan sejumlah program yang san-



Gde Dharmaja

gat penting. Seperti program pelatihan Cakep dan Cawas yang beberapa tahun ini memang nihil karena ketersediaan anggaran.

Padahal program tersebut dinilai sangat penting untuk mempersiapkan kepala sekolah dan pengawas yang sudah tersertifikat, menggantikan Kasek dan Pengawas yang pensiun setiap tahunnya. "Sertifikasi Cakep Cawas ini juga diwajibkan, kalau tidak punya sertifikat mereka tidak mendapat tunjangan, bisa tidak ada yang mau jadi Kasek atau Cakep kalau begitu, sedangkan jumlahnya terus berkurang setiap tahun," ungkap Dharmaja. k23

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *NUSA BALI*

Kategori : *JAMINAN KESEHATAN*

Pemkab Didorong Bikin Program Jaminan Kesehatan Baru

SINGARAJA, NusaBali

DPRD Buleleng meminta Pemerintah Kabupaten Buleleng mempertimbangkan membuat program jaminan kesehatan baru guna mengakomodir warga Buleleng yang belum tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini selain dapat memberi pelayanan kesehatan yang sama, juga dinilai dapat menghemat anggaran daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesti Rani-tasari, Rabu (13/11) mengatakan, alokasi anggaran yang disediakan untuk program JKN sebenarnya sudah cukup besar. Namun, dengan asumsi kenaikan iuran BPJS kelas 3 dari Rp 25.500 per

orang menjadi Rp 42.000 per orang, dipastikan berdampak besar bagi keuangan daerah. "Kalau iuran BPJS naik, artinya kan kita harus siapkan anggaran dua kali lipat dari sebelumnya. Apabila naik, kita akan mengeluarkan anggaran lebih besar," kata politisi Partai Demokrat asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubu-tambahan ini.

Untuk menghemat anggaran, dia mengusulkan agar pemerintah membuat jaminan sosial tersendiri. Jaminan itu hanya diperuntukkan bagi warga yang selama ini belum masuk dalam program JKN. Anggaran untuk jaminan sosial tersebut, dapat diambil melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rani menyebut,

program itu sudah berhasil di sejumlah daerah lain.

"Cukup 37.677 orang yang belum masuk JKN itu saja yang dibuatkan jaminan sosial. Bahasa gampangnyah kita kembali ke sistem seperti JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) dulu. Kami menyarankan agar bupati berani membuat jaminan kesehatan tersebut, demi kesejahteraan masyarakat Buleleng," imbuhnya.

Sementara, Sekkab Buleleng, Dewa Ketut Puspaka yang ditemui terpisah mengatakan, amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), hanya ada satu jaminan kesehatan, yakni, JKN. Apabila ada usu-

lan seperti itu, kemungkinan besar usulan itu tak dapat direalisasikan. "Nanti kami pertimbangkan, sebab dalam ketentuan hanya ada satu jaminan kesehatan, yakni JKN. Kami saat ini fokus melakukan validasi pada masyarakat yang benar-benar butuh (jaminan kesehatan), dan itu harus tuntas sepenuhnya," katanya.

Menurut Puspaka, pemerintah akan melakukan pembahasan lebih detail pada rapat Forum Kemitraan. Forum itu terdiri dari pemerintah daerah, DPRD, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana SJSN. "Nanti kami detailkan lagi saat rapat forum kemitraan," ungkapnya. **k19**



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : **NUSA BALI**

Kategori : **KAMTIBMAS**



PEMERIKSAAN badan dan barang bawaan masyarakat yang masuk ke Polres Buleleng pasca ledakan bom bunuh diri di Polresta Medan, Rabu (13/11) kemarin.

Polres Buleleng Perketat Penjagaan

★ Semua Pengunjung Diperiksa Badan dan Barang Bawaan

SINGARAJA, NusaBali

Penjagaan di portal depan Mako Polres Buleleng, Rabu (13/11) kemarin berbeda pasca bom bunuh diri yang terjadi di Mapolresta Medan. Pengamanan Polres Buleleng pun mendadak diperketat dengan menempatkan dua personel bersenjata lengkap di depan pintu masuk. Seluruh masyarakat yang berkunjung ke Polres juga wajib menjalani pemeriksaan badan dan barang bawaan.

Personel yang sudah disiagakan di pintu masuk Mako Polres Buleleng langsung menjajaki masyarakat yang datang dan masuk ke Mapolres Buleleng. Akses membawa kendaraan masuk ke Mapolres Buleleng pun dibatasi. Masyarakat yang ingin mengurus kelengkapan administrasi dan surat-surat diarahkan

untuk parkir di depan Polres. Tas bawaan kaca mata hingga penggunaan jaket menjadi prioritas pemeriksaan sebelum diizinkan masuk dan melanjutkan tujuannya.

Kabag Ops Polres Buleleng, Kopol Anak Agung Wiranata Kusuma, kemarin menjelaskan pengawasan dan pengamanan Mako memang diketatkan pasca meledaknya bom bunuh diri di Mapolresta Medan. Hanya saja Polres tidak membatasi masyarakat yang akan mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga pengurusan laporan-laporan.

"Pelayanan tetap jalan sebagaimana biasa hanya saja kami mohon maaf kepada masyarakat agar tidak merasa terganggu karena pemerik-

saan diperketat. Ini untuk keamanan dan kemaan bersama dan tidka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelas mantan Kapolsek Kota Singaraja itu.

Dirinya pun menyarankan kepada masyarakat yang hendak datang ke Mapolres Buleleng, tidak menggunakan pakaian dan barang bawaan yang mencurigakan. Seperti pemakaian jaket dan baju kebesaran yang dapat menimbulkan kecurigaan petugas penjagaan. Selain juga barang bawaan yang berbahaya termasuk pemakaian kacamata hitam yang tak dianjurkan.

"Jangan sampai ada hal yang kelihatan menutupi. Penggunaan kacamata hitam terutama agar dibuka saja, biar dilihat wajah yang datang siapa dan apa yang dibawa biar jelas," tegas dia.

Polres Buleleng pun berharap masyarakat ikut proaktif dan berkerjasama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Dirinya juga menyarankan kepada seluruh personelnya untuk sementara tidak memakai layanan ojek online (ojol) masuk ke dalam mako sampai pelaku dan jaringan dibalik peristiwa bom bunuh diri Medan terungkap.

Sementara itu sejumlah personel juga terus disiagakan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Perketatan keamanan juga diinstruksikan hingga jajaran polsek-polsek yang ada di Buleleng. Polres Buleleng juga mengaku akan mengerjukkan personel khusus untuk memantau pergerakan yang mengarah ke ancaman teroris dan radikalisme di Buleleng. **k23**

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *LAKA LANTAS*

Potong Jalan, Mahasiswa Tertabrak Colt



LAKA lintas mahasiswa tertabrak Colt saat melintasi jalan di jalur Singaraja-Kintamani, Rabu (13/11).

SINGARAJA, NusaBali

Seorang mahasiswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit usai mengalami kecelakaan lalu-lintas di kilometer 17 jalur Singaraja-Kintamani, wilayah Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Rabu (13/11) pukul 15.00 WITA. Mahasiswa pengendara motor tertabrak Colt Mitsubishi saat memotong jalan tanpa memperhatikan arus lalu-lintas.

Kejadian apes yang dialami korban Ni Komang Sukertiasih, 19, yang masih berstatus mahasiswa itu, bermula saat dirinya akan menyeberang jalan, menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam biru DK 2291 UP. Namun saat menarik

pegangan gas dan sepeda motornya melaju dari barat ke timur korban yang asal Banjar Kelod Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan kurang memperhatikan arus lalu lintas. Saat bersamaan melaju colt Mitsubishi DK 9677 UM yang melaju dari arah utara menuju selatan. Karena jarak terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dielakkan.

Korban Sukertiasih yang mengendara seorang diri langsung terpental setelah terhantam mobil Colt Mitsubishi. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit Parama Sidhi Buleleng karena mengalami luka robek pada bibir, patah kaki kanan. Sedangkan pengemudi Colt Mitsubishi I Nyoman

Sukrada, 38, yang saat itu mengajak istrinya Made Suarjani, 35, warga satu banjar dengan korban hanya mengalami luka ringan.

Sementara itu Kapolsek Kubutambahan, AKP I Made Mustiada, mengatakan berdasarkan keterangan saksi di lapangan, kecelakaan lalu lintas itu diduga karena kurang hati-hatinya korban pengendara sepeda motor yang tak memperhatikan arus lalu lintas sebelum menyeberang jalan. "Satu orang dirawat di rumah sakit saat ini karena ada patah kaki kanan dan sejumlah luka, sementara penyebabnya karena kurang hati-hati korban saat menyeberang jalan," jelas AKP Musstiada. **k23**

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *TEMA KONTRAK*

Gaji Tenaga Kontrak Dianggarkan Rp 90 Miliar

Rp 90 miliar digunakan untuk 3.900 orang tenaga kontrak, sehingga jika dirata-rata setiap orang menerima gaji sekitar Rp 1,5 juta atau di bawah UMR.

SINGARAJA, NusaBali

Anggaran gaji untuk tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng pada tahun 2020, diperkirakan mencapai Rp 90

miliar. DPRD Buleleng pun meminta jumlah tenaga kontrak dapat dikendalikan agar tidak terus membebani keuangan daerah. Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, Rabu (13/11) di ruang rapat Gabungan Komisi. Rapat dipimpin Wakil Ketua Dewan, Ketut Susila Umbara, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, selaku Ketua TAPD.

Dalam rapat terungkap, jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng diketahui

sebanyak 3.900 orang. Dengan jumlah tersebut, diperkirakan kebutuhan anggaran untuk gaji seluruh tenaga kontrak sebesar Rp 90 miliar. Anggaran tersebut dinilai cukup membebani keuangan daerah, di samping tidak dapat mensejahterakan mereka. "Kalau bisa jumlah tenaga kontrak itu harus dikendalikan. Sehingga tidak membebani keuangan daerah, dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (tenaga kontrak, Red)," kata anggota Bangar, Wayan Teren.

Politisi Partai Hanura, asal Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada ini mengatakan,

jumlah tenaga kontrak dapat dikendalikan dengan tidak menambah tenaga kontrak. Dicontohkan, bila ada tenaga kontrak yang berhenti, tidak mesti diisi lagi, apalagi harus menambah jumlah yang sudah ada. "Kalau bisa memanfaatkan yang sudah ada, nanti lama-lama akan berkurang. Nah kalau sudah berkurang, pemerintah akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Bangar, Nyoman Bujana. Menurut Bujana, meski pemerintah mengalokasikan anggaran gaji sampai Rp 90 miliar, tetapi karena jumlah

tenaga kontrak terlalu banyak, sehingga tidak dapat mensejahterakan mereka. "Dengan gaji rata-rata Rp 1,5 juta itu saya rasa mereka tidak akan bisa sejahtera. Ini jauh dari UMK," kata politisi PDIP asal Desa Suwug, Kecamatan Sawan ini.

Bujana menyarankan pemerintah, agar mengambil kebijakan meningkatkan kualitas SDM tenaga kontrak, agar ke depan dapat bersaing mencari tenaga kerja di tempat lain. Anggaran peningkatan kualitas SDM tersebut bisa diambilkan dari anggaran gaji tenaga kontrak. "Kalau bisa separuhnya dipakai biaya pelatihan-pelati-

han. Mereka tetap tercatat sebagai tenaga kontrak, tetapi kualitasnya ditingkatkan, sehingga menjadi SDM yang siap bersaing di tempat lain. Kalau terus jadi pegawai Pemkab, selamanya tidak sejahtera, dan ini tetap membebani keuangan daerah," kata Bujana.

Sementara Sekda Buleleng, Dewa Puspaka mengatakan, dapat memahami pemikiran anggota dewan. Namun pemikiran tersebut masih perlu dikaji dan dibahas lebih detail. "Jangankan sampai 50 persen, tiga orang saja dikeluarkan reaksinya luar biasa. Tetapi saya apresiasi pemikiran dari anggota dewan.

Nanti ini perlu bahas lebih detail, tidak *ujug-ujug* langsung ambil kebijakan. Perlu dikaji lebih dalam," terangnya.

Masih kata Sekda Puspaka, jumlah tenaga kontrak yang ada lebih banyak didominasi oleh tenaga kebersihan, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Mereka sudah memiliki *skill* masing-masing. "Justru yang perlu ditingkatkan kualitasnya adalah mereka. Misalnya, tenaga pendidik, yang terjadi begitu tamat langsung menjadi tenaga kontrak. Padahal, menjadi tenaga pendidikan itu kan perlu pengalaman dan pendidikan ilmu lainnya," katanya. k19

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~